

PERENCANAAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKOLAH (RKS)

Dosen Pengampu:

Dr. Apri Wahyudi, M.Pd.



Disusun oleh:

Listiana Ningrum	2413034018
Nadhira Bilqis Athirah	2413034056
Hanifah Nur Azizah	2413034063
Irham Maulid Fajar	2413034069
Sekar Mustika Rahayu	2413034070

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Tak lupa ucapan terima kasih kepada bapak Dr. Apri Wahyudi, M.Pd. selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan yang telah memberikan tugas ini.

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan makalah ini terdapat kekurangan- kekurangan dan jauh dari apa yang di harapkan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Adapun makalah ini ditulis dari hasil penyusunan data-data dan hasil riset kami. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa akan datang.

Bandarlampung, 15 September 2025

Kelompok 3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I: PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan	5
BAB II: PEMBAHASAN	6
2.1. Konsep Pengembangan Sekolah.....	6
2.2. Peran Komite Sekolah dan juga TPS.....	7
2.3. Perencanaan Program Sekolah	9
2.4. Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)	15
2.5. Praktek Penyusunan Program Sekolah dan Rencana Kerja	18
BAB III: PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan.....	24
DAFTAR PUSTAKA	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa karena melalui pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang cerdas, kompetitif, serta memiliki karakter yang kuat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki posisi yang sangat penting dalam proses tersebut. Oleh karena itu, sekolah perlu dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu melahirkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Dalam konteks ini, pengembangan sekolah menjadi sebuah kebutuhan sekaligus strategi yang harus terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Konsep pengembangan sekolah tidak hanya terbatas pada peningkatan aspek akademik peserta didik, tetapi juga mencakup berbagai dimensi lain, seperti manajemen, sarana prasarana, budaya sekolah, serta hubungan dengan masyarakat. Pengembangan sekolah harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan sekolah, sehingga setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dalam implementasinya, sekolah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama masyarakat dan orang tua peserta didik.

Komite sekolah hadir sebagai wadah yang mewakili partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Peran komite sekolah sangat penting dalam memberikan pertimbangan, dukungan, maupun kontrol terhadap kebijakan sekolah. Melalui keberadaan komite sekolah, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik, sementara pihak sekolah juga mendapatkan dukungan moral maupun material untuk memperkuat program-program yang telah direncanakan. Di samping itu, komite sekolah turut berperan

dalam menciptakan hubungan harmonis antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Selain komite sekolah, Tim Pengembang Sekolah (TPS) juga memiliki fungsi strategis dalam mengawal proses pengembangan sekolah. TPS terdiri atas berbagai unsur, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta perwakilan komite. Kolaborasi yang dibangun dalam TPS memungkinkan adanya koordinasi yang baik dalam penyusunan dan pelaksanaan program sekolah. TPS juga berperan memastikan bahwa program yang disusun sesuai dengan kondisi nyata sekolah, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan peserta didik.

Tahap penting dalam pengembangan sekolah adalah penyusunan perencanaan program. Perencanaan ini menjadi pedoman utama agar sekolah memiliki arah dan strategi yang jelas dalam mewujudkan visi dan misinya. Perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS), yang berisi program-program prioritas yang akan dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RKS menuntut keterlibatan aktif seluruh pihak, baik internal maupun eksternal sekolah, sehingga menghasilkan rencana yang komprehensif, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan.

Praktik penyusunan program sekolah dan RKS menjadi sarana penting dalam membangun budaya perencanaan di sekolah. Melalui praktik ini, seluruh pemangku kepentingan belajar memahami pentingnya proses perencanaan yang berbasis pada data, kondisi aktual, serta analisis kebutuhan. Tidak hanya itu, praktik ini juga menanamkan kesadaran bahwa keberhasilan sekolah bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah atau guru, tetapi merupakan hasil kerja sama seluruh elemen, termasuk orang tua dan masyarakat.

Dengan adanya konsep pengembangan sekolah yang matang, dukungan dari komite sekolah dan TPS, serta perencanaan yang terarah melalui RKS, diharapkan sekolah dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Hal ini akan berdampak pada peningkatan mutu

layanan pendidikan, pencapaian tujuan pendidikan nasional, serta pembentukan generasi yang berdaya saing tinggi di era globalisasi.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimanakah Konsep Pengembangan Sekolah?
- 1.2.2. Apa Peran Komite Sekolah dan juga TPS?
- 1.2.3. Bagaimanakah Perencanaan Program Sekolah?
- 1.2.4. Bagaimanakah Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)?
- 1.2.5. Bagaimanakah Praktek Penyusunan Program Sekolah dan Rencana Kerja?

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Mengetahui Bagaimanakah Konsep Pengembangan Sekolah.
- 1.3.2. Mengetahui Peran Komite Sekolah dan juga TPS.
- 1.3.3. Mengetahui Bagaimanakah Perencanaan Program Sekolah.
- 1.3.4. Mengidentifikasi Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS).
- 1.3.5. Mengidentifikasi Praktek Penyusunan Program Sekolah dan Rencana Kerja.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Konsep Pengembangan Sekolah

Pengembangan sekolah di Indonesia menuntut adanya kepemimpinan sekolah yang visioner dan transformatif. Kepala sekolah bukan hanya sebagai pengelola administratif, tetapi harus mampu menjadi fasilitator, motivator, mediator, dan pembimbing dalam konteks pelaksanaan program-program baru seperti Sekolah Penggerak. Misalnya, penelitian tentang peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah penggerak menunjukkan bahwa kepala sekolah yang efektif dapat memobilisasi guru dan siswa, menumbuhkan budaya kolaboratif, serta mengarahkan visi sekolah ke arah profil Pelajar Pancasila (Tambunan, 2024).

Selain kepemimpinan, budaya sekolah atau budaya organisasi memiliki peran penting dalam mendukung profesionalisme guru dan efektivitas pembelajaran. Sekolah dengan budaya yang mendukung komunikasi terbuka, pertemuan rutin antar-guru, disiplin, aturan sekolah yang jelas, dan norma sosial positif menunjukkan peningkatan kinerja guru dan manajemen pembelajaran yang lebih teratur. Di samping itu, budaya sekolah dan profesionalisme guru secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemampuan literasi dasar siswa di madrasah ibtidaiyah, yang menunjukkan bahwa tidak hanya guru yang harus kompeten tetapi lingkungan sekolah harus mendukung agar siswa dapat berkembang secara optimal (Akbar, Muslihan, & Husnawati, 2024). Pengembangan kurikulum dan iklim sekolah juga menjadi komponen yang tidak boleh diabaikan. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, misalnya, memerlukan adaptasi budaya sekolah dan iklim belajar yang mampu mendukung pembelajaran aktif, relasi antar warga sekolah yang positif, serta fleksibilitas dalam metode pengajaran (Tompul, 2024). Manajemen kelas inovatif yang relevan dengan konteks lokal juga ditemukan efektif meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar karena menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, partisipatif, dan memperhatikan kebutuhan siswa.

Terakhir, profesionalisme guru, baik melalui pelatihan, organisasi profesi, ataupun peningkatan kompetensi, sangat berkaitan erat dengan hasil belajar siswa. Banyak penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa guru yang mendapat dukungan budaya sekolah yang positif dan kepemimpinan yang baik akan menunjukkan kinerja lebih baik serta berdampak pada pencapaian siswa, termasuk literasi dasar.

2.2. Peran Komite Sekolah dan juga TPS

Komite Sekolah merupakan organisasi mandiri yang beranggotakan orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat, serta pemerhati pendidikan yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di satuan sekolah. Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam pelaksanaan pendidikan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa fungsi Komite sangat penting dalam memberikan masukan terhadap kebijakan sekolah, terutama pada perencanaan program dan penggunaan anggaran (Yusuf, Saputra, & Handayani, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Komite tidak hanya simbolis, melainkan bagian penting dalam memastikan mutu pendidikan berjalan sesuai standar.

Sebagai lembaga penghubung, Komite Sekolah berperan dalam menjembatani komunikasi antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Misalnya, penelitian Mar'ati dan Maisaroh (2020) menemukan bahwa Komite berfungsi aktif dalam memberikan pertimbangan dan pengawasan pada setiap kegiatan sekolah. Fungsi ini tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga menyangkut keterlibatan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Dengan demikian, keberadaan Komite dapat membantu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Sementara itu, Tim Pengelola Sekolah (TPS) adalah struktur internal yang dibentuk oleh kepala sekolah untuk membantu penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan program sekolah. Anggotanya biasanya terdiri dari wakil kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, serta terkadang perwakilan Komite. Studi kasus di SMPN 1 Talangpadang menunjukkan bahwa TPS bertugas menyusun

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), mengatur pembagian tugas, serta memastikan program berjalan sesuai target (Idharudin, Sari, & Rahmawati, 2025). Hal ini sejalan dengan konsep *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)* yang menekankan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Mailidarni & Djafar, 2025).

Hubungan antara Komite Sekolah dan TPS bersifat saling melengkapi. TPS menyusun rencana kerja dan anggaran, sementara Komite memberikan masukan dan persetujuan agar rencana tersebut sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian Yusuf et al. (2024) menegaskan bahwa keterlibatan Komite dalam penyusunan RKAS meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Bahkan, Permendikbud 75/2016 juga mewajibkan sekolah melaporkan penggunaan dana kepada Komite sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan mekanisme ini, Komite dan TPS sama-sama berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan berbasis partisipasi.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi kedua lembaga ini. Bagi Komite, kendala umum adalah kurangnya partisipasi aktif dari anggota akibat kesibukan pribadi, keterbatasan pemahaman manajerial, dan komunikasi yang tidak efektif (Mar'ati & Maisaroh, 2020). Sementara itu, TPS menghadapi kendala berupa beban kerja ganda, keterbatasan pelatihan, dan tumpang tindih kewenangan antaranggota (Idharudin et al., 2025). Tantangan ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menghambat kinerja Komite maupun TPS dalam mendukung sekolah.

Di sisi lain, terdapat peluang yang bisa dimaksimalkan. Komite Sekolah mampu memperkuat dukungan sumber daya melalui penggalangan dana sukarela, membangun jejaring dengan pihak luar, serta memfasilitasi komunikasi masyarakat dengan sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Solok (2025) menekankan bahwa Komite berperan strategis dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan. Bagi TPS, peluangnya adalah meningkatkan profesionalisme manajemen sekolah melalui pelatihan manajerial, penggunaan teknologi informasi, serta kolaborasi dengan Komite. Dengan sinergi yang baik, keduanya dapat menjadi motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah dan TPS memegang peran vital dalam pengelolaan pendidikan. Komite Sekolah menjadi mitra strategis yang menjamin akuntabilitas, sementara TPS berfokus pada eksekusi kebijakan internal. Hubungan keduanya bersifat komplementer: TPS mengelola, Komite mengawasi dan mendukung. Apabila tantangan yang ada dapat diatasi, kolaborasi keduanya akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di sekolah.

2.3. Perencanaan Program Sekolah

Perencanaan merupakan bagian yang strategis dan inilah kosekuensi terakhir pelaksanaan MBS di sekolah. Salah satu manfaat perencanaan dalam organisasi adalah terciptanya fokus arah yang hendak dicapai. Fokus dalam konteks ini adalah bahwa organisasi mengetahui secara jelas kebutuhan stake-holder dan bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Perencanaan memungkinkan perubahan dalam organisasi atas suatu keadaan atau menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan. Selanjutnya, perencanaan juga menyebabkan tindakan organisasi menjadi terfokus. Fokus tindakan dalam konteks ini adalah terciptanya prioritas-prioritas kebutuhan dalam organisasi. Perencanaan dapat mengantisipasi masalah-masalah dan memberikan jalan bagaimana mengatasinya. Selanjutnya perencanaan juga dapat memberikan manfaat-manfaat dalam upaya meningkatkan koordinasi antar individu, kelompok, dan sub-sub sistem dalam suatu organisasi. Untuk itulah sekolah harus memiliki perencanaan yang dikemas secara sistematis.

Setiap sekolah pada umumnya telah memiliki visi, misi, dan tujuan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu mutlak diperlukan adanya suatu pengembangan program sekolah. Berbagai program yang dikembangkan tersebut harus relevan dengan visi dan misi sekolah serta sebagai bentuk penjabaran yang lebih rinci, terukur, dan feasible untuk dilaksanakan di sekolah. Pengembangan program sekolah hendaknya dilakukan melalui tahapan yang sistematis dengan langkah-langkah yang dapat dipertanggung jawabkan, baik secara akademik, yuridis, maupun sosial. Pengembangan program sekolah juga harus mempertimbangkan potensi dan kemampuan sekolah, sejauh mana kekuatan sekolah dan lingkungan

mendukung keterlaksanaan program, dan apakah terdapat ancaman atau hambatan dalam pelaksanaan nantinya.

Sekolah dapat menentukan seberapa besar peluang yang ada dari program yang dikembangkan untuk ditetapkan sebagai suatu rencana-rencana kegiatan yang dapat ditempuh dengan tingkat keberhasilan tinggi. Sekolah yang menyusun program tanpa mengindahkan berbagai pertimbangan tersebut akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan, baik penyimpangan dalam bentuk perubahan atau penggantian program, kemacetan program, tidak terlaksananya program, banyaknya hambatan yang muncul, maupun penyimpangan keuangan. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan program tersebut merupakan suatu pemborosan dan kerugian dalam berbagai bidang yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan keberhasilan yang diinginkan. Begitupun dengan sekolah yang programnya tidak terukur, tidak jelas, tidak applicable, dan tidak fokus, dampak yang terjadi akan lebih besar dan berpotensi merugikan semua pihak. Terjadinya kekeliruan manajemen sekolah juga disebabkan kondisi program sekolah yang salah, begitupun sebaliknya.

Pada sisi lain, kesuksesan sekolah dalam bentuk prestasi akademik maupun non akademik tidak terlepas dari program sekolah yang ditata dengan baik dan benar. Sustainability keberhasilan sekolah bertaraf nasional dan internasional juga disebabkan adanya kejelasan program sekolah yang memiliki sifat jangka menengah dan jangka panjang. Pengembangan program sekolah hendaknya melalui tahapan yang sistematis dan langkah-langkahnya dapat di pertanggung jawabkan, baik secara akademik, yuridis, maupun sosial. Dalam pengembangan program sekolah juga harus mempertimbangkan potensi dan kemampuan sekolah, sejauh mana kekuatan sekolah dan lingkungan mendukung keterlaksanaan program sekolah. Oleh karena itu, pengembangan program-program sekolah, baik secara kualitas maupun kuantitas, dianggap sangat penting sehingga dalam penyelenggaraan pendidikannya dapat terarah dengan langkahlangkah pelaksanaan yang efektif dan efisien.

a. Visi Sekolah

Dinyatakan oleh Hafizin bahwa “Kata visi berasal dari bahasa Inggris, Vision yang berarti visi, daya lihat, impian, atau bayangan. Secara etimologis, itu juga bisa menjadi penampilan dengan gagasan yang dalam dan jelas untuk mencapai masa depan yang jauh. Visi adalah kemampuan untuk melihat inti masalah. Oleh karena itu, kata visi itu sederhana, pendek, padat dan jelas, melainkan sekadar cita-cita, angan-angan, dan impian-impian ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang, termasuk makna yang luas, jauh dan bermakna. Visi merupakan sekumpulan kata bahkan kalimat yang menggambarkan mimpi, aspirasi, rencana, harapan untuk masa depan asosiasi, perusahaan, dan organisasi” (Hafizin & Herman, 2022).

Visi pendidikan merupakan pernyataan dalam bentuk angan-angan yang menjelaskan identitas institusi yang akan dicapai di masa yang akan datang. Berharap untuk masa depan akan ada beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi nanti. Mengembangkan visi lembaga pendidikan perlu mengetahui kemajuan yang terjadi di masa depan. Di sebuah sekolah, visi merupakan gambaran masa depan yang dicapai untuk menentukan perlunya memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan. Visi organisasi (sekolah) sangat penting memegang peranan penting. Menurut Akdon dalam Calam et.al. (2020), “ada beberapa kriteria untuk merumuskan sebuah visi antara lain:

1. Visi adalah gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan bukan fakta.
 2. Visi dapat memberikan arahan kepada anggota organisasi Mencapai kinerja yang baik.
 3. Bisa menginspirasi dan siap hadapi tantangan.
 4. Sebuah jembatan antara masa kini dan masa depan akan datang.
 5. Gambaran yang realistis dan andal masa depan yang menyenangkan.
- Sifatnya tidak statis, abadi “ (Calam dkk., 2020).

Visi merupakan impian masa yang akan datang tentang keadaan sekolah. Oleh sebab itu rumusan visi sekolah akan menjadi motivasi sekaligus kerangka bertindak bagi warga sekolah. Meskipun demikian rumusan

visi harus bersifat realistis, dinamis dan tidak muluk-muluk. Realistis mengandung makna sesuai dengan potensi yang dimiliki sekolah, baik potensi sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana serta fasilitas sekolah. Dinamis berarti dapat disesuaikan dengan perubahan kebijakan stakeholder, perkembangan informasi dan teknologi. Visi adalah branding suatu sekolah. Oleh sebab itu rumusan visi hendaknya singkat, mudah dipahami, bersifat motivasi dan tidak berlebihan.

b. Misi Sekolah

Menurut Hastasasi et.al, “Misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan” (Hastasasi dkk., 2022). Misi dibuat agar dapat memberikan rujukan dan panduan yang lebih operasional untuk penyusunan dan pengembangan program kerja yang akan dibuat oleh sekolah. Dengan demikian, tidak adanya misi menyebabkan visi yang sudah dibuat sulit untuk direalisasikan.

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi misi adalah penjabaran dari visi dalam bentuk perumusan tugas, kewajiban dan desain tindakan yang diarahkan kepada visi. Dengan demikian, misi merupakan bentuk pelayanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikator ada beberapa kriteria dalam penciptaan misi antara lain:

1. Penjelasan produk atau layanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat.
2. Harus jelas memiliki target public untuk dicapai.
3. Kualitas produk dan layanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat.
4. Penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan ke depan juga bermanfaat dan manfaatnya bagi masyarakat dengan produk dan layanan yang tersedia.

c. Tujuan Sekolah

Tujuan adalah deskripsi dari pernyataan misi, oleh karena itu tujuan merupakan salah satu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci sukses yang dilakukan setelah visi dan misi ditetapkan. Menurut Akdon dalam Calam et.al, “Tujuan tidak harus ditentukan secara kuantitatif, tetapi “harus dapat menunjukkan kondisi yang akan dicapai di masa yang akan datang. Tujuan memandu dalam mengembangkan tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai misi. Oleh karena itu, tujuan harus mampu memberikan landasan yang kokoh bagi penetapan indikator” (Calam dkk., 2020). Tujuan akan menjelaskan instruksi yang jelas kepada sekolah. Pengembangan tujuan dapat berupa strategi, arah politik, dan program sekolah. Untuk itu, pengembangan tujuan perlu lebih spesifik dan mudah dipahami. Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika mengembangkan tujuan sekolah yaitu:

1. Tujuan sekolah adalah menyediakan jumlah yang konkrit dan akuntabel (terukur).
2. Tujuan sekolah adalah penjelasan dan misi, sehingga tujuan harus sejalan dengan visi dan misi.
3. Tujuan sekolah adalah untuk menentukan kegiatan, apa yang secara spesifik diselesaikan dan kapan akan diselesaikan.

Tujuan pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi sekolah yang telah dirancang. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dalam rangka merealisasikan misi. Pencapaian tujuan dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja sebuah organisasi. Isi tujuan ini masih bersifat global, baik isi yang mengarah pada pencapaian standar nasional pada aspek isi, proses, sarana, kelulusan, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, maupun penilaian. Masing-masing aspek yang dikembangkan dalam tiap tujuan dirumuskan secara relatif umum atau belum terlalu operasional. Rumusan tujuan sekolah lebih bersifat spesifik dan terukur karena menyatakan gambaran hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Merumuskan tujuan sekolah mengacu pada visi dan misi serta

mempertimbangkan karakteristik dan ciri khas sekolah, dengan demikian rumusan tujuan akan sinkron dengan visi dan misi sekolah.

d. Sasaran Indikator

Sasaran merupakan arah capaian yang lebih spesifik dan terukur dari tujuan yang telah ditetapkan. Jika tujuan sekolah masih bersifat umum dan berlaku dalam jangka menengah, maka sasaran disusun untuk menjabarkannya ke dalam bentuk yang lebih terfokus serta dapat diwujudkan dalam kurun waktu yang lebih singkat, biasanya satu tahun ajaran. Dengan adanya sasaran, setiap program sekolah memiliki orientasi yang jelas dan terukur sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan.

Sasaran berfungsi sebagai titik antara yang menghubungkan tujuan jangka menengah dengan hasil nyata yang dapat dicapai dalam jangka pendek. Melalui sasaran, sekolah dapat memetakan langkah-langkah kerja yang lebih rinci, menetapkan prioritas yang harus dicapai dalam periode tertentu, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan benar-benar mendukung pencapaian tujuan. Sasaran juga berperan penting dalam memfokuskan seluruh sumber daya sekolah, baik tenaga pendidik, peserta didik, maupun sarana prasarana, agar selaras dengan arah pengembangan yang diinginkan.

Indikator adalah ukuran keberhasilan dari sasaran yang telah dirumuskan. Tanpa indikator, sasaran hanya menjadi pernyataan umum yang sulit dievaluasi. Indikator memberikan parameter yang jelas untuk menilai apakah suatu sasaran telah tercapai atau masih memerlukan perbaikan. Dengan adanya indikator, sekolah dapat mengukur capaian secara obyektif dan melakukan analisis yang lebih terarah terhadap hasil program.

Indikator memiliki fungsi utama sebagai tolok ukur dalam proses monitoring dan evaluasi. Melalui indikator, tingkat keberhasilan suatu program dapat diketahui, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, indikator membantu pihak sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih tepat, baik untuk memperbaiki kelemahan,

mempertahankan keberhasilan, maupun meningkatkan kualitas program yang sedang berjalan. Indikator yang baik harus memenuhi prinsip SMART:

1. Specific (spesifik) → jelas menggambarkan apa yang diukur.
2. Measurable (terukur) → hasilnya bisa dinilai dengan angka atau deskripsi yang nyata.
3. Achievable (dapat dicapai) → realistis sesuai kondisi sekolah.
4. Relevant (relevan) → sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah.
5. Time-bound (ada batas waktu) → dicapai dalam periode tertentu, misalnya satu semester atau satu tahun.

2.4.Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)

Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan dua elemen penting dalam perencanaan dan pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah. RKS, sebagaimana diatur dalam Panduan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah, adalah dokumen yang merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi sekolah untuk jangka waktu tertentu (Kemendikbud, 2023). Sementara itu, RKAS berfokus pada pengelolaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dalam RKS, sebagaimana dijabarkan dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peran strategis RKS dan RKAS dalam mencapai mutu pendidikan yang optimal telah menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sekolah. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu kunci keberhasilan penyusunan dokumen perencanaan ini. Susanti (2022) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RKS dan RKAS dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program sekolah terhadap kebutuhan lokal. Lebih lanjut, implementasi RKAS memainkan peranan penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar. Penelitian oleh Setiawan dan Lestari (2023) menunjukkan bahwa penggunaan RKAS yang terarah dan efektif mampu mendukung kegiatan pembelajaran yang lebih berkualitas. Implementasi ini harus mengacu ada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa

sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal. Di tingkat global, panduan dari UNESCO (2022) menekankan pentingnya perencanaan dan manajemen sekolah yang sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui perencanaan strategis berbasis sekolah. Pendahuluan ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya RKS dan RKAS dalam sistem pendidikan nasional serta bagaimana implementasinya dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kajian ini didasarkan pada kerangka teoritis dan kebijakan nasional, serta hasil penelitian relevan yang mendukung praktik terbaik dalam penyusunan dan implementasi RKS serta RKAS.

Prinsip-prinsip Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) didasarkan pada sejumlah prinsip agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkualitas. Prinsip tersebut mencakup aspek **efektivitas dan efisiensi**, yaitu menjamin tercapainya tujuan sekolah dengan penggunaan sumber daya yang hemat serta risiko yang kecil. Selanjutnya, terdapat prinsip **keterkaitan dan konsistensi** yang menekankan pentingnya hubungan yang selaras antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKS juga bersifat **partisipatif**, di mana kepala sekolah bersama seluruh pemangku kepentingan sekolah dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaannya. Selain itu, prinsip **berkelanjutan dan berkeadilan** menegaskan bahwa penggunaan sumber daya harus dilakukan secara adil, berkesinambungan, serta tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi. RKS juga diharapkan mampu **memberikan arah yang jelas** mengenai pengembangan sekolah sehingga setiap kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik dan terhindar dari tumpang tindih. Lebih lanjut, RKS berfungsi sebagai **acuan pengajuan sumber daya pendidikan**, yaitu menjadi pedoman dalam mengidentifikasi dan mengajukan kebutuhan sekolah untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

A. Tahapan penyusunan RKS umumnya meliputi:

1. Analisis Situasi: Mengidentifikasi kondisi sekolah, baik dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman (analisis SWOT).

Tahap ini mencakup pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari berbagai sumber.

2. Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan: Menyelaraskan visi dan misi sekolah dengan tujuan pendidikan nasional, serta menyesuaikannya dengan konteks lokal.
3. Penentuan Strategi: Merumuskan langkah-langkah strategis berdasarkan analisis kebutuhan, mencakup program-program prioritas yang harus dilaksanakan.
4. Penyusunan Rencana Aksi: Merinci kegiatan operasional, indikator keberhasilan, alokasi anggaran, dan penjadwalan kegiatan.
5. Evaluasi dan Validasi: Melibatkan diskusi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan dokumen RKS sesuai dengan kebutuhan dan harapan semua pihak.
6. Pengesahan dan Implementasi: Setelah disahkan oleh pihak berwenang, RKS menjadi pedoman resmi untuk pelaksanaan program di sekolah.
7. Proses penyusunan RKS yang inklusif dan berbasis data ini tidak hanya membantu sekolah dalam menentukan prioritas, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Selain itu, RKS yang terencana dengan baik akan mempermudah sekolah dalam meraih berbagai dukungan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

A. Dasar Hukum

Berdasarkan kajian beberapa jurnal penelitian di Indonesia, penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Pertama, **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan** menjadi rujukan penting karena mengatur standar yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan, termasuk dalam penyusunan RKS (Suryadi, 2021). Kedua, **Permendikbud Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan** juga mempertegas bahwa penyusunan RKS harus sejalan dengan standar nasional yang

berlaku agar mutu pendidikan dapat terjamin (Wahyuni, 2023). Ketiga, **Panduan Penyusunan RKS** yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi acuan teknis bagi sekolah dalam merancang program kerja yang sistematis dan terukur (Putra & Anisa, 2020). Keempat, **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan** memberikan landasan regulasi yang mengikat terkait berbagai aspek pendidikan, mulai dari standar isi, proses, penilaian, hingga pembiayaan, yang kesemuanya relevan dengan implementasi RKS di sekolah.

2.5. Praktek Penyusunan Program Sekolah dan Rencana Kerja

Program Sekolah merupakan seperangkat kegiatan yang disusun secara sistematis oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Program ini mencakup berbagai bidang, mulai dari akademik, kesiswaan, kurikulum, sarana dan prasarana, hingga kemitraan dengan masyarakat. Melalui penyusunan program sekolah, setiap kegiatan yang dijalankan dapat terarah, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekolah. Selain itu, program sekolah juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah.

Sementara itu, Rencana Kerja Sekolah (RKS) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (empat tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, serta indikator pencapaian sekolah. RKS menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), yaitu penjabaran rencana kegiatan dalam kurun waktu satu tahun dengan indikator keberhasilan yang lebih terukur. Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah wajib menyusun RKS dan RKT sebagai pedoman dalam melaksanakan program sekolah sekaligus sebagai landasan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dengan demikian, perencanaan yang matang melalui RKS dan RKT akan membantu sekolah dalam mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

A. Prinsip- prinsip Penyusunan Program dan Rencana Kerja Sekolah

Dalam penyusunan program dan rencana kerja sekolah, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan agar rencana yang dibuat benar-benar relevan, realistis, dan dapat dilaksanakan dengan baik :

1. Partisipatif: Penyusunan program dan rencana kerja sekolah harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, serta stakeholder lain yang relevan. Keterlibatan banyak pihak akan menghasilkan rancangan program yang lebih komprehensif, sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, serta mendapat dukungan penuh dari seluruh unsur sekolah. Prinsip ini juga menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.
2. Berbasis Data: Setiap program dan rencana kerja yang disusun harus didasarkan pada data yang valid dan akurat, misalnya hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) atau profil sekolah. Data ini mencerminkan kondisi riil sekolah, baik kelebihan maupun kelemahan, sehingga program yang dirancang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, prioritas kegiatan dapat disusun secara objektif, dan penggunaan sumber daya sekolah dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan.
3. Kontekstual: Program yang disusun harus menyesuaikan dengan kondisi nyata, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki sekolah. Setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari aspek lingkungan, peserta didik, maupun sarana prasarana. Oleh karena itu, rencana kerja yang disusun perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar dapat dijalankan secara realistis dan memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan sekolah.
4. Terukur: Prinsip terukur menekankan bahwa setiap program yang disusun harus memiliki target capaian yang jelas serta indikator keberhasilan yang dapat dinilai. Indikator ini menjadi pedoman dalam menilai sejauh mana program berhasil dijalankan. Dengan adanya tolok ukur yang jelas, sekolah dapat melakukan evaluasi dan

tindak lanjut yang tepat, sehingga perbaikan dan pengembangan dapat terus dilakukan.

5. Berkelanjutan: Program dan rencana kerja sekolah harus dirancang untuk mendukung pengembangan jangka panjang, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat. Prinsip berkelanjutan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak positif secara konsisten dan berkesinambungan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan begitu, sekolah dapat terus berkembang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. Tahapan Praktik Penyusunan Program Sekolah dan RKS

Penyusunan program sekolah dan Rencana Kerja Sekolah (RKS) merupakan proses penting untuk memastikan setiap kegiatan pendidikan di sekolah berjalan terarah, terukur, dan berkesinambungan. RKS tidak hanya menjadi pedoman kerja bagi kepala sekolah dan guru, tetapi juga menjadi dasar dalam penggunaan sumber daya sekolah agar lebih efektif. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan berikut:

1. Analisis Situasi: Tahap awal dalam penyusunan program sekolah dan Rencana Kerja Sekolah (RKS) adalah melakukan analisis situasi. Pada tahap ini, sekolah perlu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki, biasanya melalui analisis SWOT. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, seperti Evaluasi Diri Sekolah (EDS), hasil ujian siswa, rapor mutu, maupun masukan dari masyarakat sekitar. Analisis ini sangat penting untuk mengetahui kondisi riil sekolah sehingga program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.
2. Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan: Setelah kondisi sekolah diketahui, tahap berikutnya adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan. Visi berfungsi sebagai gambaran ideal arah masa depan sekolah yang ingin dicapai, misalnya menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi akademik dan berkarakter. Misi merupakan langkah

strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi, seperti meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat karakter siswa, atau mengembangkan kerjasama dengan masyarakat. Tujuan disusun lebih konkret, realistis, dan terukur agar dapat dijadikan dasar penetapan program, misalnya meningkatkan rata-rata nilai ujian nasional sebesar 10% dalam empat tahun.

3. Penetapan Program Prioritas: Tahap selanjutnya adalah menetapkan program-program prioritas sesuai dengan bidang pengembangan sekolah. Program ini biasanya dibagi ke dalam beberapa aspek, seperti Bidang akademik: peningkatan hasil belajar siswa, pengembangan kurikulum, dan pelatihan guru. Bidang kesiswaan: pembinaan karakter, penguatan kegiatan ekstrakurikuler, serta peningkatan disiplin. Bidang sarana-prasarana: pembangunan ruang kelas baru, pengadaan laboratorium, pengembangan perpustakaan, atau perbaikan fasilitas sekolah. Bidang kemitraan: kerja sama dengan orang tua, dunia usaha, lembaga pendidikan tinggi, maupun masyarakat sekitar untuk mendukung kegiatan sekolah. Penetapan prioritas membantu sekolah fokus pada kebutuhan yang paling mendesak sekaligus strategis.
4. Penyusunan Rencana Kerja: Berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan, sekolah kemudian menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS memuat rincian kegiatan, alokasi anggaran, serta jadwal pelaksanaan secara lebih detail. Dengan adanya RKAS, penggunaan dana sekolah lebih transparan, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pelaksanaan dan Monitoring: Pada tahap ini, program dijalankan sesuai dengan jadwal dan pembagian tugas yang telah ditentukan. Seluruh pihak sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, staf, hingga siswa dilibatkan sesuai dengan perannya masing-masing. Selain itu, monitoring dilakukan secara berkala oleh kepala sekolah bersama tim manajemen. Monitoring bertujuan memastikan bahwa kegiatan

berjalan sesuai rencana, hambatan dapat segera diatasi, dan capaian program dapat diukur sejak awal.

6. Evaluasi dan Tindak Lanjut: Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap ketercapaian program yang telah dijalankan. Evaluasi mencakup penilaian atas keberhasilan, kendala, serta efektivitas pelaksanaan program. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan dan pengembangan pada periode berikutnya. Dengan demikian, program sekolah tidak berhenti pada pelaksanaan saja, tetapi menjadi siklus berkelanjutan yang terus disempurnakan dari tahun ke tahun.

C. Contoh Praktik Penyusunan

Sebagai contoh, sebuah sekolah melakukan analisis situasi dan menemukan kelemahan pada aspek literasi siswa, seperti rendahnya minat baca dan kemampuan memahami teks. Dari hasil analisis ini, sekolah kemudian merumuskan program prioritas yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dengan nama “Gerakan Literasi Sekolah” (GLS). Program ini dirancang untuk meningkatkan budaya literasi siswa sekaligus mendukung pencapaian tujuan pendidikan jangka panjang.

Agar program berjalan operasional, sekolah menjabarkan RKS ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan langkah-langkah konkret, antara lain:

1. Menetapkan penambahan jam membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai sebagai rutinitas harian seluruh siswa.
2. Membuat pojok baca di setiap kelas dengan koleksi buku yang sesuai usia dan minat siswa, sehingga akses terhadap bahan bacaan lebih mudah.
3. Menyelenggarakan pelatihan guru tentang strategi pembelajaran berbasis literasi, misalnya teknik membaca kritis, membaca intensif, dan integrasi literasi ke dalam semua mata pelajaran.

Selama pelaksanaan, sekolah melakukan monitoring secara rutin, baik melalui pengamatan guru maupun laporan perkembangan siswa. Selanjutnya, evaluasi dilakukan setiap semester untuk menilai sejauh mana

program berhasil meningkatkan kemampuan literasi siswa. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam memperbaiki strategi, misalnya dengan menambah variasi bahan bacaan atau memperluas kegiatan literasi melalui lomba menulis, bedah buku, atau kunjungan perpustakaan daerah. Dengan cara ini, program tidak hanya bersifat sesaat, tetapi terus berkembang secara berkelanjutan.

Penyusunan program sekolah dan Rencana Kerja Sekolah (RKS) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Proses ini harus dilakukan secara sistematis melalui tahapan analisis situasi, perumusan visi-misi, penetapan program prioritas, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip seperti partisipatif, berbasis data, kontekstual, terukur, dan berkelanjutan, program yang disusun akan lebih relevan, realistis, dan memiliki dampak nyata bagi sekolah.

Contoh penerapan program literasi menunjukkan bahwa ketika sekolah mampu mengidentifikasi permasalahan dengan tepat lalu merumuskan strategi yang sesuai, maka tujuan pendidikan dapat tercapai lebih efektif. Oleh karena itu, setiap sekolah perlu menjadikan RKS dan RKT bukan hanya dokumen administratif, tetapi pedoman operasional yang benar-benar diimplementasikan secara konsisten. Dengan demikian, pengembangan sekolah akan berjalan lebih terarah dan berkesinambungan, serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan sesuai tuntutan zaman.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konsep pengembangan sekolah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen yang terarah, partisipatif, dan akuntabel. Keberadaan komite sekolah dan Tim Pengembang Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, masukan, serta kontrol terhadap kebijakan dan program sekolah.

Perencanaan program sekolah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan sekolah agar sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penyusunan RKS yang melibatkan berbagai pihak tidak hanya memperkuat legitimasi program, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah.

Melalui praktik penyusunan program sekolah dan RKS, sekolah dapat belajar mengelola sumber daya secara efektif, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta membangun budaya partisipasi dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, pengembangan sekolah dapat berjalan secara berkelanjutan, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Muslihan, & Husnawati. (2024). Pengaruh Profesionalisme Guru dan Budaya Sekolah terhadap Kemampuan Literasi Dasar Siswa Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.21137/jpp.2024.16.1.4>
- Calam, A., Marhamah, A., & Nazaruddin, I. (2020). Reformulasi Visi, Misi dan Tujuan Sekolah. *AL-IRSYAD: JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING*, 10(2), Art. 2. <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v10i2.8526>
- Disdik Solok. (2025). *Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan*. Solok: Dinas Pendidikan Kabupaten Solok.
- Hafizin, H., & Herman, H. (2022). Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(01), Art. 01. <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2095>
- Hastasasi, W., Harjatanaya, T. Y., Kristiani, A. D., Herutami, I., & Andiarti, A. (2022). Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. *BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA*.
- Idharudin, I., Sari, F. P., & Rahmawati, N. (2025). Peran Tim Pengelola Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis manajemen sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 12(2), 145–156.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Jakarta: Kemendikbud
- Mailidarni, N., & Djafar, T. (2025). *Fisiologi tumbuhan: Proses, mekanisme, dan adaptasi*. Yogyakarta: Elfarazy Media Publisher.
- Mar'ati, A., & Maisaroh, S. (2020). Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 5(2), 89–99.

- Patmawati, I., Ma'arif, M. N., Toyibah, E. H., & Rasmanah, C. (2023). Pentingnya visi, misi, dan tujuan sekolah. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 182-187.
- Putra, R., & Anisa, D. (2020). Panduan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah sebagai Strategi Peningkatan Mutu. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 45–57.
- Setiawati, N., Nurdiana, & Alinuridin. (2023). *Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah*. *Jurnal Abdi Laksana*, 4(2), 335–343.
- Sudari, S., dkk. (2024). *Strategi Penyusunan dan Implementasi RKS dan RKAS untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas*. *Jurnal Pendas Mahakam*, 9(1), 205–214.
- Wahyuni, I. (2023). Permendikbud Nomor 14 Tahun 2022 sebagai Penguatan Standar Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(1), 33–47.
- Yusuf, A., Saputra, H., & Handayani, R. (2024). Keterlibatan komite sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 18(1), 55–68.